

ABSTRAK

Zilva Nurfalisha Rafasanindyta Tsauri (1208010229): “Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung”

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1990 Pasal 9 tentang Hak Asasi Manusia, kesehatan adalah salah satu hak asasi yang menjadi unsur kesejahteraan bagi tiap individu. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupannya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengakui pentingnya udara bersih dan menetapkan upaya pengendalian pencemaran udara, termasuk bahaya rokok. Rokok mengandung zat adiktif dan beracun yang mengancam kesehatan baik perokok aktif maupun pasif. Indonesia memiliki prevalensi perokok yang tinggi, termasuk di Kota Bandung, yang mendesak perlunya penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan dan efektivitas kebijakan KTR di kantor Kemenag Kota Bandung dalam menciptakan lingkungan kerja bebas rokok, mengidentifikasi kelompok sasaran dan mengevaluasi perubahan perilaku merokok, peran organisasi pelaksana, serta menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Smith yang mencakup empat variabel utama: kebijakan yang diidealkan mencakup pola interaksi yang dirancang oleh pembuat kebijakan, kelompok sasaran adalah individu yang diharapkan mengadopsi kebijakan tersebut, organisasi pelaksana adalah unit-unit birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, dan faktor lingkungan mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya baik dari Dinas Kesehatan, kebijakan yang diidealkan menghadapi tantangan seperti inkonsistensi dalam penerapan dan kurangnya teladan dari pimpinan. Kelompok sasaran, termasuk pegawai dan pengunjung, memerlukan pelatihan dan edukasi yang lebih mendalam untuk perubahan perilaku jangka panjang. Organisasi pelaksana berperan penting, tetapi tingkat kesadaran dan kepatuhan pegawai masih rendah meskipun ada fasilitas merokok dan peraturan daerah. Faktor lingkungan seperti dukungan institusional dan surat edaran juga mempengaruhi implementasi kebijakan, namun kurangnya sanksi tegas menghambat efektivitasnya. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan pelatihan, sosialisasi, pengawasan kolaboratif, dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk keberhasilan kebijakan KTR di kantor Kemenag Kota Bandung.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok